

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Wisnubroto, G Wdiiartama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2018
- Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tagerang Selatan, 2019
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Perkembangan Penyusunan Konsep, KUHP Baru* Cetakan III, PT Citra Bakti, Bandung, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2022, Jakarta timur
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy marliana Listiningsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- D Schaffmeister, N. Kejizer dan E.P.H. Sitoris terjemahan J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1995
- Delfiana Gusman, Yunita Syofyan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2021
- Eddy O.S, Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Handoyo, Eko, *Pendidikan anti korupsi*, Ombak (Anggota IKAPI), Semarang, 2013

Irwansyah, *Penelitian hukum pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021

Jhon M, Echols, Hasan Shadiy, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000

Kristian, Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Mubyanto, *Ilmu Ekonomi, ilmu sosial dan Keadilan*, Yayasan argo ekonomika, Jakarta, 1988

M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Libertyn Yogyakarta, 2005

Marwan Effendy, *Korupsi Dan Strategi Nasional*, Referensi, Jakarta Selatan, 2013

Manthovani, *Penyadapan VS Privasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2007

N. Wardaningsih, *Hukum dan Peradilan*, CV Pamularsih, Jakarta, 2009

Sulistia, Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Pangabea, *Pendapatan Henry, Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurispudensi Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2014

R. Soernarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Siswanto, S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Jurnal

Ayurahmi Rais, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5, No 1, 2017

- Agus Suntoro,” Penyadapan Dan Esistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17.No. 1, 2020
- Ahadi Fajrin Prasetya, “Kewenangan Lembaga Non-Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 1, No. 1, 2020
- Ahmad Yunus, Moh. Ali Hofi, “formulasi kewenangan penyadapan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia”, *jurnal hukum HUKMY*, vol, 1 No. 1, 2021
- Aguinaldo Marbun,” Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pembarantasan korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Agung munandar, Syahrudin nawai, Askari Razak, “Analisis Tentang Penyadapan Oleh kejaksaan Dalam Pengeakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal of social Science research*, Vol. 3, No. 3, 2023
- Agung munandar, Syahrudin nawai, Askari Razak,” Analisis Tentang Penyadapan Oleh kejaksaan Dalam Pengeakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal of social Science research*, Vol. 3, No. 3, 2023
- Alvieta Alice Reyhanif, Faiza Nisrina,” Legalitas Alat Bukti Eletronik dari Hasil Penyadapan Dalam proses Peradilan: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Andi Nur Rachman, Mujar Ibnu Syarif, “Problematika Izin komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Upaya Penyadapan Tersangka Korupsi”, *Jurnal Mavisha Law and Socceety*, Vol. 1, No. 1, 2024
- Debby Natalia Ang, “Tinjaun Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015
- Damian Agata Yuvens, “Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017
- Dominikus Jawa, Parnigotan Malau, Ciptono Ciptono, “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024
- Eka Agus Hidayat, “Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik”, *Jurnal Tadalako Master Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2010

- Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, 2015
- Fitri juwita, Dame Siregar, “Penyadapan Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 5, 2022
- Frandy Risonna Tarigan, Aprilia Sumodinigrat, “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Welfare State*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Goklas Sitanggang, “Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Retentum*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Hardy Salim, Monika Kurnia, Nada Dwi Azhari, “Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan”, *Jurnal Adil*, Vol. 9, No. 2, 2018
- Ifrani,” Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX, No. 3, 2017
- Indriani, Lin, “Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek hukum Pengebangan Industri”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, No. 3, 2020
- Idham Fadli,” Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika”, *Jurnal Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 2, 2022
- John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia Upaya Mensjehaterakan Mayarakat (*Social Walfare*)”, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, Christina N.M. Tobing, “Pertetangan Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan oleh Aparat Penegak hukum Terhadap Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Junior Teng Lewier, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Iqbal Taufik, “Tindak Pidana Penyadapan Dengan Modus *Sniffing*”, *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 2, 2023

- Kamaruddin, “Perspektif hukum”, *Jurnal Fakultas of law Hang Tuah University*, Vol. 21, No. 2, 2021
- Lili Hartini,” Penerapan Fonetik Akustik dan Teori Grice Pada Rekaman Penyadapan Telepon Sebagai Alat Bukti Hukum: Kajian Ligistik Forensik Terhadap Percakapan Antara Artalya Suryani Dengan Jaksa Urip Tri Gunawan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2010, hlm. 223
- Mudemar A. Rasyidin,” Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama”, *jurnal Mitra manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2014
- Muhammad Arif Hidayat, “Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif sistem peradilan pidana” , *Bdamai Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Mohammad Fahmi Amrullah, “Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 11, 2020
- Nur Alam Abdullah, “konstitusionalitas Penyadapan (Interception) Dengan Peraturan Pemerintah Dari Sudut Pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010’ , *Jurnal Jatiswara*, Vol. 27, No. 3, 2012
- Nike Ayu Lestari,” Penyadapan Terhadap Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” , *Jurnal Badamai Law*, Vol. 5, No. 2, september 2020
- Ni putu riyani riyani kartika, Ni luh putu geney sri Kusuma dewi, “Eksistensi Pembuktian Positif”, *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, 2020
- Nofanda Prayudha, “Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Belom Bahadat*, Vol. 14, No. 1, 2024
- Puteri Hikmawati,” Pengaturan izin penyadapan oleh kpk pasca putusan mahkamah konstitusi No. 70/PUU.XVII/2019”. *Jurnal negara hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022
- Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, “Penyadapan dalam perspektif Hak Asasi manusia”, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Supriyadi Widodo Eddyono,” Mengurai Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP”, *Journal Badamai Law*. Vol. 1, No.3, 2014
- Reinaldy P. Polimpung, Tonny Rompis, Liju Zet Viany, “Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 3, 2021
- Raissa Anita Fitria, “Penyadapan Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Mimbar Keadilan*
- Syifa Fachrunisa, “Penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 12, 2021
- Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman,” Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 11, 2021
- Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, 2013
- Susanto, “Kedudukan Hasil Audit Investigatif pada kekayaan Usaha Milik Negara Persero Dalam hukum Pembuktian Pidana di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2018
- Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri,” Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020
- Steve Jelly Walintukan, Dientje Rumimpunu, dan rudy R. Walitulingas, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyadapan (Interespsi) Menurut Undang-Undang Telekomunikasi Serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, 2022
- Tamara Laurencia,” Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of law”, *Jurnal Mercatoria*, Vol.12, No. 2, 2019
- Yeni Widowaty, “Criminal Corporate Liability In Favor Of The Victims In The Case Of Environmental Crime”, *jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, 2012
- Yodi Alfahri Daun, Tofik Yanuar Chandra, Agung Makbul, “Kewenangan KPK melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana Korupsi”, *Jurnal Salam Sosial dan Budaya syar-I*, Vol.9, No. 5, 2022
- Vivi Octaviani, Usman, Tri Imam Munandar, “Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pampas*, Vol 3, No. 3, 2022

Virginia Maramis, Theresia Jusuf, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 3, 2020

C. Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Putusan Nomor: 243 K/Pid.Sus/2009

Putusan Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.KJT.PST.

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-bukti-rekaman-percakapan-artalyta-dengan-urip-hol19382>

<https://tirto.id/kpk-sesalkan-hakim-praperadilan-setnov-tolak-bukti-rekaman-cxrG>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

<https://www.icw.or.id>